

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SURAKARTA**



Naskah Publikasi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat–Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

AGUNG SETYO PURWANTO

B 200 110 017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SURAKARTA”**

Yang disusun oleh:

AGUNG SETYO PURWANTO

B 200 110 017

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 27 Juni 2015

Pembimbing


(Dra. Majiyati, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, S.E, M.Si)

ABSTRACT

This research was aimed to test the effect of tax-paying awareness, tax rules comprehension, positive view point of tax system effectiveness, and service quality towards the faithfulness of tax-payers, in this case, institution, registered in KPP Pratama of Surakarta.

The population of this research was all of the tax-payers, in this case institution, registered in KPP Pratama of Surakarta. The number of samples in this research was 39 respondents taken by certain criteria. This research belonged to quantitative one with questionnaire contained certain criteria employed as the method of data collection. The hypothesis was examined using Multiple Linear Regression analysis, with t test, F test, and coefficient of determination (*Adj*).

The result showed that tax-paying awareness variable and positive view point of tax system effectiveness variable has no relation or influence towards the faithfulness of tax-paying. Furthermore, tax rules comprehension variable and service quality variable has a relation or influence towards the faithfulness of tax-paying. It was shown from the result for the value of R^2 earned in Multiple Regression analysis that the number of coefficient of determination with adjusted R^2 was 0.381. It meant that 38.1% of the the faithfulness for tax-paying variable could be explained by the variable of tax-paying awareness, tax rules comprehension, positive view point of tax system effectiveness, and service quality. Meanwhile, the rest, 61.9%, was explained by other external factors which were not a part in this research.

Key words: positive view point of tax system effectiveness, service quality, tax-paying awareness, tax rules comprehension, the faithfulness of tax-payers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 39 responden yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan metode pengumpulan datanya menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditetapkan kriterianya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (*Adj*).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak dan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil perhitungan

untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,381. Hal ini berarti bahwa 38,1% variasi variable kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variable kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan. Sedangkan sisanya yaitu 61,9 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Kata kunci: Kepatuhan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan

1. Pendahuluan

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian (Suhendra, 2010).

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang bandel mengabaikan kewajiban pajak (Hardiningsih, 2011).

Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang

mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kedua program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Suhendra, 2010).

Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara. Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 Sri Rizki Utami, et al (2012).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Rizki Utami, et al (2012) yang membahas tentang Pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang terdiri dari: kesadaran membayar pajak, pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Tetapi mengganti objek penelitian dari wajib pajak pribadi menjadi wajib pajak badan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA”.

2. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Aris dan Mujiyati, 2011).

2. Pengertian Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Pasal 2 UU PPh, yang dimaksud wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial publik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Muljono, 2010:45).

3. Fungsi Pajak

Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Aris dan Mujiyati, 2011: 6) :

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya itu dapat diperoleh penerimaan pajak.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Safri Nurmanto, 2010). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assesment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

a) Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004).

(H1) : *Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.*

b) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal.

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010).

(H2) : *Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.*

c) Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu.

Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

(H3): *Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.*

d) Kualitas Pelayanan

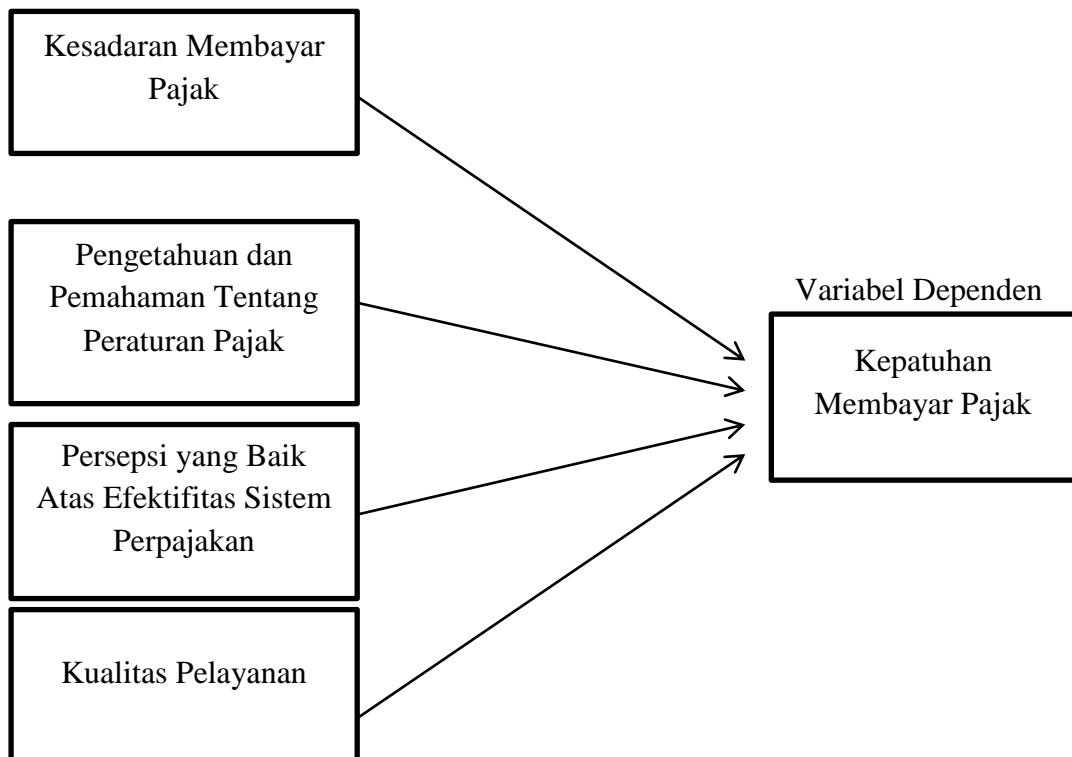
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2007) dalam Utami, et al (2012). Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Tjiptono (2007) dalam Utami, et al (2012) menyimpulkan bahwa citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang/ persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang/ persepsi konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang mengkonsumsi serta yang menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa layanan.

(H4): *Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.*

Kerangka konseptual penelitian ini dari rangkaian hipotesis diatas adalah sebagai berikut:

Variabel Independen



3. Metode Penelitian

A. Populasi, Sampel dan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, yaitu sebanyak 11.527 WP Badan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive Sampling. Adapun kriteria yang dijadikan responden adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.
2. Memiliki penghasilan bruto $\geq 4,8$ M
3. Tertib dalam pembayaran pajak maupun pelaporan SPT selama 5 tahun berturut-turut
4. Wajib pajak badan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan.

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer, dan sumber data diperoleh dari menyebarkan kuesioner ke WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri atas empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak.

2. Definisi Operasional

a. Kesadaran Membayar Pajak

Terdapat beberapa indikator mengenai kesadaran membayar pajak, yaitu:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

b. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak.

1. Kepemilikan NPWP. setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Wajib pajak membayar pajak berdasarkan pendapatan bersihnya dikalikan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

c. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Hal – hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain:

1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
2. Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.
3. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat.
4. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet.
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak.

d. Kualitas Pelayanan

Indikator dari kualitas pelayanan yang baik adalah:

1. Kemampuan petugas pajak untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya sudah dilaksanakan.
2. Petugas pajak telah berlaku sopan dalam memberikan pelayanan.
3. Petugas melayani dengan cepat dan siap menolong ketika ada permintaan dari wajib pajak
4. Kantor pelayanan pajak telah memberikan pelayanan sesuai dengan jam kerja yang telah ada.

e. Kepatuhan Membayar Pajak

Beberapa indikator bahwa wajib pajak patuh dalam membayar pajak, yaitu:

1. Paham dan berusaha memahami UU perpajakan
2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar
3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

C. Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda.

$$K = \alpha + \beta_1 KMP + \beta_2 PPP + \beta_3 P + \beta_4 KP + \varepsilon$$

4. Hasil Penelitian

A. Pengujian Instrumen Data

1. Uji Reliabilitas

Dari hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan nilai nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 berarti dapat ditentukan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel.

2. Uji Validitas

Dari uji validitas data, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh bahwa uji r-hitung pada variabel kesadaran membayar pajak, variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan variabel kualitas pelayanan lebih besar daripada r-tabel (product moment). Dengan demikian, semua variabel independen dalam penelitian ini adalah valid.

B. Uji Ketepatan Model

1. Uji Koefisien Determinasi R^2

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,381. Hal ini berarti bahwa 38,1% variasi variabel kepatuhan

membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan, sedangkan sisanya yaitu 61,9 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

2. Uji F

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa F_{hitung} (6,586) lebih besar dari F_{tabel} (2,85) dan nilai signifikansi $= 0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak, sehingga menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat andalkan atau model sudah *fit* sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian secara individual.

3. Uji t

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t berikut:

Variabel kesadaran membayar pajak diketahui bahwa nilai T_{hitung} sebesar -0,377 lebih kecil dari T_{tabel} 2,032 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,708 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, berarti H_1 ditolak, yang artinya bahwa variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,968 lebih besar dari t_{tabel} 2,032 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti H_2 diterima, yang artinya bahwa variabel pengetahuan pemahaman mempunyai berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,258 lebih kecil dari t_{tabel} 2,032 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,217 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ berarti H_3 ditolak, yang artinya bahwa variabel persepsi efektivitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Variabel kualitas pelayanan diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,321 lebih besar dari t_{tabel} 2,032 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti H_4 diterima, yang artinya bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

C. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil tersebut dengan menggunakan pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model untuk penelitian ini memiliki sebaran data yang normal.

2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dari persamaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Tolerance Value* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil yang diteliti ditunjukkan bahwa semua variabel independen kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, persepsi efektivitas dan kualitas pelayanan menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model	DW	DU	4-DU	Keterangan
Regresi	1,8600	1,7215	2,2785	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data primer diolah penulis, 2015

Pada tabel menunjukkan nilai DW adalah 1,8600; nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan tingkat signifikan 5%, jumlah sampel (n) = 39 dan variabel independen (k) = 4 maka diperoleh nilai du = 1,7215. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW berada di daerah bebas autokorelasi, yaitu $du < d < 4-du$ atau $1,7215 < 1,8600 < 2,2785$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gangguan autokorelasi dalam model regresi.

5. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
5. Hasil analisis uji F dapat diketahui bahwa H_0 ditolak, sehingga menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat andalkan atau model sudah fit sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian secara individual.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Objek yang diteliti hanya pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta saja dan hanya melakukan penelitian pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan saja. Hasil yang berbeda mungkin akan terjadi jika objek yang diteliti dan jumlah responden dapat ditambah dan lebih diperluas lagi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Mungkin hasil penelitian akan lebih baik dan luas lagi apabila jumlah variabel independen ditambah.
3. Banyak responden yang mengisi kuesioner tidak lengkap, bahkan ada yang tidak diisi sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa ada beberapa responden yang mengisi kuesioner secara terburu-buru, kurang paham mengenai pertanyaan yang diberikan, bahkan tidak serius dalam mengisi kuesioner. Sehingga proses pengumpulan data kurang maksimal.

C. Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya:

- a. Diharapkan agar lebih memperluas jangkauan penelitian dengan cara menambah jumlah responden, tidak hanya meneliti pada WP badan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan saja. Dan mungkin akan lebih baik lagi jika penelitian tidak hanya pada WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta saja, tetapi juga melakukan penelitian di seluruh KPP Pratama di karisidenan Surakarta, atau bahkan lebih.
- b. Pada penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen saja, yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah jumlah variabel atau menggunakan variabel lain untuk menguji faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi KPP Pratama Surakarta

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak dan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Oleh karena itu, hendaknya petugas KPP Pratama Surakarta lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi, seperti seminar perpajakan di daerah-daerah, memasang iklan di media cetak maupun elektronik dan melakukan pelatihan tentang pajak, agar wajib pajak lebih sadar terhadap kewajibannya membayar pajak. Selain itu wajib pajak tentunya akan lebih mengerti dan paham mengenai sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini.

6. Daftar Pustaka

- Djoko Muldjono. 2010. *HUKUM PAJAK-Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010.

Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

<http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>

<http://junaidichaniago.wordpress.com.2010>.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 192/KMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Tax & Accounting Review, Vol 1, No.1, 2013.

M. Abdul Aris dan Mujiyati. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Solo : Muhammadiyah Unniversity Press.

Pancawati Hardiningsih. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, November 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ./2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Sri Rizki Utami, Andi, Ayu Noorida Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama Serang*. Simposium Nasional Akuntansi 13.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ./2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Wajib Pajak Patuh

Tarif Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Widayanti dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas :Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga*.Simposium Nasional Akuntansi 13.